

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

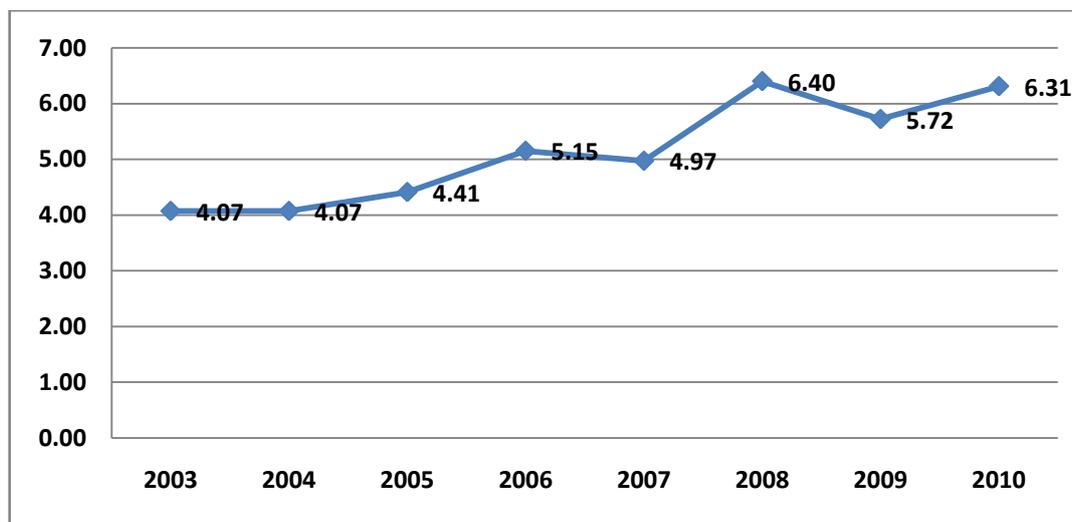
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, 2008).

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu kawasan tidak memenuhi standar pengeluaran minimum yang di butuhkan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan, terdapat lebih banyak pendapatn untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan.

Ekonomi yang tumbuh semakin kuat dan disertai kenaikan PDRB per kapita, belum diikuti oleh persebaran kekayaan pada seluruh penduduk atau masih ada kesenjangan. Meski ekonomi Kota Padang terus tumbuh, tetapi belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk kota. Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS bisa dilihat dari angka gini ratio Kota Padang yakni sebesar 0,2637 pada tahun 2008 yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan antara kelompok penduduk, salah satunya merefleksikan masih banyaknya penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan atau pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah angka garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS.

Gambar 1.1

Tingkat kemiskinan Kota Padang tahun 2003 – 2010



Sumber : BPS – Kota Padang

Tingkat kemiskinan di kota Padang pada periode tahun 2003 hingga tahun 2010 mengalami kecenderungan Meningkat, seperti terlihat pada Gambar 1.1. diatas Pada periode tahun 2003 sampai 2006 tingkat kemiskinan meningkat dari sebesar 4,07% pada tahun 2003 menjadi 5,15% pada tahun 2006, pada tahun 2008 terjadi kembali peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 6,40%. Pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,72%. Dan pada tahun 2010 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 6,31%, hal ini dikarenakan terjadinya gempa bumi yg melanda kota padang pada September 2009 yang berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan kota padang di tahun 2010.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan sejak Januari 2001 dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya PAD yang diterima oleh daerah tersebut. Otonomi daerah akan menimbulkan kemampuan daerah yang berbeda, khususnya kemampuan dalam hal penerimaan pendapatan. Tinggi atau rendahnya tingkat kemampuan suatu daerah tergantung pada mampu atau tidaknya suatu daerah mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi suatu daerah untuk melaksanakan proses kemandirian daerah, tanpa didukung oleh pemerintah pusat.

Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen (Kuncoro, 2007). Oleh karena itu, Pemerintah Pusat akan membantu mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal dan membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. DAU dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dan prioritas daerah termasuk kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Mawardi dan Sumarto (2003) dalam pembagian DAU mencakup variabel jumlah penduduk miskin. Bantuan dana transfer dari pemerintah pusat yang besar seharusnya dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun fasilitas bagi kepentingan publik tetapi faktanya sampai saat ini tingkat kemiskinan tiap daerah masih tergolong tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan dana alokasi umum terhadap kemiskinan. yang dalam hal ini akan penulis tuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kota padang tahun 2003 - 2010.
2. Apakah alokasi dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kota padang tahun 2003 - 2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota padang.
2. Mengetahui Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap tingkat Kemiskinan di kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan dimabil, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di indonesia.
2. Memberikan kontribusi bahan referensi dan sumber informasi oleh pihak lain yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan dampak pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Memberikan informasi serta menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca tentang pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

1.5 Ruang lingkup

Analisis dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh dan hubungan variabel-variabel : Pertumbuhan Ekonomi dan Dana alokasi Umum terhadap Tingkat kemiskinan di kota Padang. Data yang digunakan adalah data *time series* yang berada pada rentang waktu 2003 - 2010.

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Merupakan laju pertumbuhan PDRB kota Padang dari tahun ke tahun.

2. Dana Alokasi Umum.

Merupakan realisasi dana alokasi umum kota Padang dari tahun ke tahun.

3. Tingkat kemiskinan.

Merupakan jumlah penduduk miskin di kota padang dari tahun ke tahun.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang merupakan dasar bagi analisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sedangkan kajian pustakan berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat hipotesa penelitian sebagai jawaban sementara atas perumusan masalah, sehingga hipotesa yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah.

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

Bab ini berisi tentang keadaan historis dan geografis, perkembangan jumlah penduduk, perekonomian, Dan Dana alokasi umum kota Padang.

BAB V HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang analisa hasil regresi. Bab ini juga menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan implikasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi